

## KEBIJAKAN DAN INOVASI MENINGKATKAN PRODUKSI BERAS

**Soekarwo**

Ketua Dewan Pertimbangan DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  
(PA-GMNI)

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Korespondensi : [Pakdhesoekarwo@gmail.com](mailto:Pakdhesoekarwo@gmail.com)

Submitted

: 10 Agustus 2024

Published

: 13 Agustus 2024

### Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi masih minim dan kemampuan mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga Indonesia melakukan kebijakan impor untuk barang setengah jadi menjadi barang jadi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan jumlah penduduk yang sangat besar (Rahayu & Febriaty, 2019).

Dalam upaya mencegah terjadinya kelaparan dan gejolak ekonomi dan politik, kecukupan pangan beras dengan kualitas dan harga terjangkau merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian; yang jika tidak diimbangi signifikansi laju pertumbuhan produksi pangan domestik berdampak rendahnya ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi pangan (beras) nasional, dapat dilakukan dengan penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi dan kebutuhan, peningkatan produktivitas/optimalisasi potensi sumberdaya pertanian; peningkatan luas areal tanam dan pengelolaan lahan; dukungan sarana produksi dan permodalan; jaminan harga gabah, harga jual dan pemasaran gabah dan beras yang memberikan insentif produksi; penurunan konsumsi beras; penyempurnaan manajemen, teknis, data dan informasi; serta peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan terkait (Elizabeth, 2021).

Pemenuhan konsumsi pangan, terutama beras bagi Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Indonesia masih memiliki persoalan ketersediaan beras yang pemenuhannya sampai saat ini masih diimpor. Berdasarkan indeks ketahanan pangan global (GFSI) yang bersumber dari The *Economist Intelligence Unit* (EIU) New York, tahun 2022 Indonesia berada pada urutan ke 63 dari 113 negara di dunia dengan skor 60,2 (kategori moderat) dengan indikator ketersediaan pasokan hanya 50,9 poin, dan indikator keterjangkauan harga pangan cukup baik dengan skor 81,5. Aspek ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan.

**Tabel 1. Luas Panen, Provititas dan Produksi Padi di Indonesia 2019-2023**

Padi	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen (juta ha)	10,68	10,66	10,41	10,45	10,21
Provititas (ton/ha)	5,11	5,13	5,23	5,24	5,28
Produksi (juta ton)	54,60	54,65	54,42	54,75	53,98

Sumber: BPS, 2024 (Diolah)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, luas panen padi di Indonesia seluas 10,21 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 53,98 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, luas panen 2023 turun 0,24 juta hektare atau 2,29 %. Produksi padi 2023 mengalami penurunan sebesar 0,77 juta ton atau 1,4% dari tahun 2022.

**Tabel 2. Produksi, Konsumsi dan Impor Beras di Indonesia 2019-2023**

Beras	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi (juta ton)	31,33	31,50	31,36	31,54	31,10
Konsumsi (juta ton)	28,69	30,26	30,30	30,14	30,76
Surplus (juta ton)	2,64	1,24	1,06	1,40	0,34
Impor (juta ton)	0,44	0,36	0,41	0,43	3,06

Sumber: BPS, 2024 (Diolah)

Tahun 2023, Produksi beras di Indonesia sebesar 31,10 juta ton, dengan produksi tahun sebelumnya 31,54 juta ton. Produksi beras 2023 mengalami penurunan sebesar 0,44 juta ton atau 1,4% dari tahun 2022. Sementara, konsumsi beras tahun 2023 sebesar 30,76 juta ton, meningkat 0,62 juta ton atau 2,05 % dari tahun 2023.

Berdasarkan data BPS, tahun 2023 konsumsi beras oleh penduduk Indonesia dalam seminggu sebesar 1,558 kilogram (kg) dengan jumlah penduduk 280,73 juta jiwa, maka konsumsi agregat untuk rumah tangga sebesar 22,74 juta ton. Di luar konsumsi rumah tangga terdapat konsumsi beras untuk restoran, industri dan lainnya sekitar 8,02 juta ton.

Berdasarkan neraca produksi dan konsumsi beras, sebenarnya ada surplus produksi beras nasional setiap tahunnya, namun surplus tersebut tidak pernah melampaui konsumsi beras nasional dalam satu bulan yang diperkirakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2,56 juta ton. Cadangan beras nasional di Gudang Bulog yang diharapkan ada pada kisaran 10 persen dari konsumsi beras tiap tahun untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras juga sulit terwujud. Di sisi lain, kerumitan memastikan berapa sebenarnya jumlah padi atau beras yang ada di masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan terjaminnya stok beras nasional. Kondisi inilah yang membuat pemerintah harus menempuh impor untuk memastikan jaminan ketersediaan beras dalam kondisi aman di tengah perubahan iklim ekstrem dan tidak menentu dewasa ini.

Impor beras Indonesia pada tahun 2021 sebesar 407.740 ton, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 429.207 ton atau naik 5%. Sementara untuk tahun 2023 pemerintah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton sebagai antisipasi dampak El Nino. Sementara untuk tahun 2024 pemerintah Indonesia berencana kembali mengimpor beras sebanyak 4,04 juta ton sebagai antisipasi dampak El Nino.

Data terbaru, BPS melaporkan, potensi luas panen padi Januari-April 2024 seluas 3,52 juta hektare (ha), turun 0,69 juta ha (16,48%) dibandingkan periode sama 2023 seluas 4,21 juta ha. Sementara itu produksi padi Januari-April 2024 sebesar 18,59 juta ton GKG, turun 3,95 juta ton atau 17,5% dibandingkan periode sama 2023 sekitar 22,55 juta ton. Produksi beras Januari-April 2024 diperkirakan 10,71 juta ton, turun 2,28 juta ton (17,5%) dibandingkan periode sama 2023 sebesar 12,98 juta ton.

Penurunan produksi padi yang linier dengan penurunan produksi beras menyebabkan kenaikan harga beras. Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 di tingkat pedagang eceran untuk beras medium di kisaran Rp14.330 per kg dan beras premium Rp16.470 per kg. Sejak 3 April 2024, Bapanas menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras untuk meningkatkan stok beras yang dikelola Bulog sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Untuk penyesuaian, HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram (kg) difleksibelkan menjadi Rp 6.000 per kg. Selanjutnya GKG di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg mengalami fleksibilitas menjadi Rp 7.400 per kg. Sementara HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95

persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp 9.950 per kg difleksibelkan menjadi Rp 11.000 per kg.

Kenaikan harga gabah dan beras memberi keuntungan bagi petani yang menjadi produsen. Namun di sisi lain, harga beras yang terus meningkat menyebabkan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, mengingat bahwa komoditas beras berkontribusi besar terhadap inflasi dan garis kemiskinan. Di berbagai daerah banyak ditemukan petani yang menjadi produsen beras, justeru juga menjadi konsumen yang mengalami kesulitan saat terjadi kenaikan harga beras. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi dan menetapkan kebijakan sekaligus strategi yang tepat untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.

## **Pembahasan**

### **Upaya Meningkatkan Produksi Beras**

Peningkatan produksi beras sangat terkait dengan memenuhi sarana input pertanian di hulu dan meningkatkan kesejahteraan petani di hilir. Jadi pendekatannya harus dilakukan berbarengan dan simultan yaitu menjamin ketersediaan input pertanian dan memastikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen beras.

Di hulu, penguatan input pertanian, yang meliputi lahan, pengairan, benih unggul, alat mesin pertanian (alsintan), tenaga kerja, pupuk kimia, pupuk organik (pupuk majemuk), pembasmi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan terjaminnya air. Di hilir, diperlukan pembiayaan/fasilitas kredit bagi kelompok yang untuk pengadaan mesin pengering, penggiling padi, packaging hampa dan petani mendapatkan pembelian gabah terbaik dari pemerintah.

Dalam aspek lahan, diperlukan upaya lebih kuat untuk menghambat laju alih fungsi lahan pertanian produktif. Data Kementerian Pertanian (2022) menunjukkan sekitar 400.000 hektar lahan sawah beralih fungsi setiap lima tahun ke depan, dengan potensi kehilangan hasil padi mencapai 2,4 juta ton gabah kering giling. Data Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menunjukkan terjadi penurunan luas lahan baku sawah dari 7,75 juta hektare (ha) pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta ha pada tahun 2019 (Dirjen PSP, 2020). Pemerintah berupaya mempertahankan lahan dengan kebijakan larangan alih fungsi lahan pertanian pangan. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mengacu pada UU No.41 Tahun 2009 yang Sebagian diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu indikator yang mencakup faktor biaya produksi dan harga serta dampaknya terhadap kesejahteraan adalah NTP atau Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan salah satu indikator dalam mengukur harga pada tingkat petani dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan profesi petani. Data menunjukkan nilai NTP kerap sekali berada di bawah 100. Nilai tersebut menunjukkan bahwa harga yang diterima petani dari produksinya lebih rendah daripada indeks harga yang dibayarkan petani baik untuk melanjutkan produksi maupun memenuhi kebutuhan hidup.

Data Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR (2018) menunjukkan bahwa 52% jaringan irigasi yang telah ada berada dalam kondisi rusak, terutama jaringan tersier (Bappenas, 2021), belum termasuk kerusakan 46% infrastruktur irigasi, terutama irigasi untuk tanaman pangan (World Bank, 2021). Dengan demikian, pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana irigasi yang telah ada tidak kalah pentingnya dengan pembangunan irigasi baru.

Dalam aspek pengairan, dalam beberapa tahun terakhir memang telah terjadi peningkatan jumlah bendungan. Sampai akhir 2022 telah dibangun 36 bendungan, ribuan embung dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi. Di sisi lain, audit BPK menemukan bahwa: 1) banyak bendungan belum terintegrasi dengan jaringan irigasi; 2) irigasi primer dan sekunder belum diikuti jaringan tersier; 3) target pembangunan sejuta ha jaringan irigasi (RPJMN 2015- 2019) meleset dan hanya tercapai 125 ribu ha. Selain itu, 46% jaringan irigasi dalam kondisi rusak dan luas area lahan

pertanian yang dilengkapi sistem irigasi hanya 10,79% pada tahun 2021. Oleh karena itu diperlukan beberapa kebijakan untuk merevitalisasi dukungan pengairan terhadap pertanian. Dalam jangka pendek harus dilakukan perawatan infrastruktur irigasi yang telah dibangun dan pembangunan sumur dalam untuk daerah yang sulit air. Dalam jangka menengah-panjang diperlukan peningkatan jaringan irigasi sekunder dan tersier untuk memanfaatkan pembangunan bendungan dan embung. Selain itu diperlukan pengenalan teknologi untuk penggunaan air yang efisien (*smart irrigation, drip irrigation, water-efficient irrigation dan rain water retention*)

Untuk aspek alsintan, diperlukan topangan yang kuat dari industri manufaktur untuk penyediaan alat mesin pertanian, serta mesin untuk mengolah produk pertanian agar menghasilkan nilai tambah. Hal ini penting untuk mengatasi tingginya ketergantungan pada alsintan dan pengolah hasil produk pertanian impor. Produksi domestik baru mampu memenuhi <50% kebutuhan mesin penggilingan padi, traktor tangan, mesin pengolah tanah, mesin panen, pengering, perontok multiguna, pemotong rumput, penghancur jerami dan alat lainnya, belum termasuk mesin produksi pangan. Untuk itu perlu peningkatan produksi alsintan dari dalam negeri dengan menggunakan bahan baku lokal.

Dalam aspek tenaga kerja, pertanian pangan Indonesia memerlukan peningkatan produktivitas dan regenerasi. Sektor pertanian memiliki persentase informalitas tertinggi, upah terendah, dan proporsi pekerja yang hidup dalam kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan sektor lain. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) pertanian menunjukkan kecenderungan semakin dominannya petani usia tua, serta tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah. Untuk perlu upaya mendorong generasi milenial terlibat dalam produksi pangan.

Terkait pupuk subsidi, diperlukan reformasi tata niaga dan kebijakan subsidi pupuk untuk menjamin efisiensi subsidi dan efektivitas subsidi untuk mendukung pertanian pangan. Reformasi kebijakan perlu mencakup setidaknya aspek penguatan produksi pupuk dalam negeri, penyempurnaan skema subsidi yang telah berjalan beserta analisis biaya-manfaat dari skema alternatifnya, tinjauan kecukupan alokasi subsidi, penyempurnaan mekanisme distribusi, penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi, serta perbaikan pola penggunaan pupuk oleh petani.

### Inovasi di Ngawi, Jawa Timur.

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mampu menjadi daerah dengan produktivitas (Provitas) padi tertinggi nasional tahun 2023 mencapai 6,2 ton GKG per hektar. Luas area tanam padi di Ngawi sekitar 50.000 ha dengan produksi padinya mencapai 771.251 ton GKG dengan indeks tanam 2,88 di atas indeks tanam nasional 1,4. Selain mampu membuat inovasi pertanian dengan upaya mengimplementasikan pertanian modern untuk mewujudkan Jatim sebagai lumbung pangan nasional, diantaranya dengan penggunaan pupuk organik dan dalam menjaga daya dukung alam. Pertanian modern dan tingginya 3 produktivitas padi di Ngawi tersebut tentunya dapat terjadi karena didukung oleh sinergitas yang baik antara pemerintah, petani, dan inovasi yang diterapkan.

**Tabel 3. Luas Panen, Provitas dan Produksi Padi di Ngawi**

Tahun	Komoditas Padi			Beras (Ton)
	Panen (Ha)	Provitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	
2022	128.586	5,9	755.939	436.494
2023	124.923	6,2	771.251	445.336

Sumber: Pemerintah Kabupaten Ngawi, 2024

Di Ngawi terdapat kelembagaan petani dengan 1.122 kelompok tani, 214 gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan 7 asosiasi petani. Selain itu terdapat 3 korporasi petani yaitu Ngawi Tani Mandiri (NGM), Gerih Makmur Sejahtera (GMS), dan Cepoko Makmur Raharjo. Kabupaten

Ngawi juga memiliki kelembagaan penyuluh pertanian yang lengkap yaitu Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di 19 kecamatan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 123 orang, Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 104 orang dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) 10 buah. Sebanyak 70 persen penduduk Ngawi adalah petani dengan 1274 orang petani milenial.

Kabupaten Ngawi melakukan inovasi berupa pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) dengan penggunaan campuran pupuk kimia dan organik (majemuk), pupuk organik dan bantuan alsintan (alat mesin pertanian) seperti traktor dari Pemerintahan Kabupaten Ngawi.

Tahun 2023 luasan padi yang menggunakan pupuk organik di Ngawi sebesar 8.941,53 hektar dengan produktivitas 7,4 ton per hektar. Di Ngawi produktivitas padi sebelum menggunakan pupuk organik sebesar 5,6 ton per hektar. Setelah menggunakan pupuk organik menjadi 7,4 ton per-hektar atau naik 1,8 ton per-hektar atau meningkat 32,14%.

Dalam memenuhi kecukupan air, sejak tahun 2019 Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan PLN melakukan inovasi menggunakan sumur bor *submersible* berenergi Listrik. Pengembangan Infrastruktur Irigasi Air Tanah di Ngawi memiliki 22.367 air sumur. Saat ini jaringan listrik *Electricity For Agriculture/El-farm* milik masyarakat masuk sawah di Ngawi mencapai 17.160 unit dan yang terbanyak di Indonesia. Inovasi pengairan ini mengaliri 44.784 hektare dan 414 daerah irigasi dengan indeks tanam 2,88.

Pemkab Ngawi juga melakukan pembinaan kepada petani milenial melalui *Agro Techno Park* sebagai tempat berkumpul petani untuk pelatihan, koordinasi, Pemkab Ngawi juga memfasilitasi lahirnya Toko Petani Milenial Indonesia untuk menyerap hasil pertanian yang ada di beberapa pasar tradisional dan didistribusikan ke pasar di Jakarta.

Untuk alat mesin pertanian (Alsintan) pasca-panen di Ngawi terdapat 148 *rice miling unit* (RMU)/mesin penggiling padi skala medium-besar, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 58 unit dan *dryer*/pengering 43 unit. Inovasi pembuatan *bed dryer* (pengering padi) kapasitas 20 ton dengan modal awal dari bantuan Pemerintah Pusat melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp235 juta. Proses pengeringan padi dilakukan pada suhu 32-35 derajat selama 1 jam untuk setiap satu ton GKG. Gapoktan mendapatkan keuntungan dari *dryer* sebesar Rp800/kg. Replikasi *bed dryer* tersebut telah dilaksanakan dan saat ini sudah dipasarkan melalui e-katalog LPSE untuk area Kabupaten Ngawi dengan harga jual Rp200 juta. Penggunaan *bed dryer* sangat membantu petani untuk menyimpan padi saat harga jatuh atau musim panen. Dengan adanya *bed dryer* maka kepemilikan luas lahan 1 ha saja cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil petani

Dalam meningkatkan produksi pangan (padi), Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan tiga pendekatan yaitu: **Pertama, memasifkan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB)**. Memberikan bantuan lumbung Mikroorganisme lokal (MOL) untuk memasifkan PRLB yang telah terbukti mandiri sarana produksi untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksi padi. **Kedua, Optimalisasi *Electricity for Farm (El-Farm)***. Peningkatan index pertanaman dan perluasan areal tanam melalui Optimalisasi *Electricity for Farm*, seperti: optimalisasi *submersible* dan pompanisasi pada lahan potensial. **Ketiga, penyediaan benih unggul**. Merealisasikan program pemerintah melalui sarana perbenihan in-situ di Kabupaten Ngawi, agar mandiri benih dengan kualitas yang dapat dikontrol pada setiap prosesnya.

## Penutup

Sejatinya Indonesia adalah negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar harus memiliki pertanian pangan yang kuat untuk menjadi negara yang kuat. Oleh karena itu, pemenuhan pangan utama seperti beras harus bisa dilakukan dari dalam negeri, tanpa perlu melakukan impor. Upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan membangun kedaulatan pangan menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik pada tataran global maupun domestik. Pada tataran global, tren menunjukkan meningkatnya harga pangan, proteksionisme, instabilitas geopolitik dan ketidakpastian iklim. Di dalam negeri muncul

tantangan tekanan populasi yang akan berjumlah 319 juta orang pada 2045, alih fungsi lahan yang drastis, disparitas produksi dan harga pangan antar daerah, serta rendahnya minat generasi muda untuk bertani. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya mendasar dan simultan dalam meningkatkan produksi beras. Berikut adalah sejumlah saran dan usulan untuk mencapai hal tersebut.

1. Di hulu, adanya jaminan kepastian tersedianya sarana produksi yaitu bibit padi unggul, pupuk kimia dan pupuk organik (pupuk majemuk), pembasmi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan terjaminnya kecukupan air.
2. Di hilir, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembiayaan/kredit usaha rakyat (KUR) terhadap gabungan kelompok tani (gapoktan) yang rata-rata memiliki lahan 200-300 hektare untuk pengadaan *dryer* (mesin pengering), penggiling padi atau *rice milling* unit (RMU) dan *packaging* hampa.
3. Harga pembelian pemerintah untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) harus memperhitungkan kesejahteraan petani dengan memberikan harga terbaik. Penentuan HPP harus mampu meningkatkan nilai tukar petani (NTP) tiap tahunnya dengan NTP lebih besar dari 100.
4. Pemerintah harus mampu meningkatkan indeks tanam padi dari rata-rata nasional 1,4 saat ini menjadi 2,88. Luas lahan 10,21 juta hektare harus dimaksimalkan menuju indeks tanam padi 2,88. Pengalaman Kabupaten Ngawi bisa dijadikan rujukan dengan melakukan pengelolaan manajemen air yang tepat dan penggunaan secara perlahan pupuk organik dan pupuk majemuk mengingat terus menurunnya produktivitas padi akibat jenuhnya tanah karena penggunaan pupuk kimia. Untuk daerah-daerah irigasi buruk dan sulit air bisa menggunakan teknologi sumur dalam.
5. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pupuk subsidi atau memberikan alternatif susidi pupuk yang memberikan manfaat langsung kepada petani dan mampu meningkatkan produksi pertanian pangan.
6. Sejauh mungkin menempuh kebijakan zero impor beras. Jikapun harus melakukan impor untuk keperluan stok, hanya boleh dilakukan dengan syarat karena produksi beras nasional tidak tercukupi dan impor tidak dilakukan pada saat musim panen raya.
7. Kementerian Dalam Negeri sebagai atasan langsung kepala daerah harus menempatkan ketahanan pangan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Daerah yang mayoritas pekerjaan warganya petani dan wilayahnya sebagian besar pertanian pangan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pemerintah perlu memberikan ukuran keberhasilan pemerintah daerah di sesuaikan dengan potensi utama daerah yang bersangkutan. Untuk daerah pertanian, salah satu ukuran Kepala Daerah yang dimaksud adalah mampu meningkatkan produksi pangan daerah yang dipimpinnya. Pemerintah pusat juga perlu memberikan pelatihan/kursus pengetahuan pertanian untuk para kepala daerah yang wilayahnya mayoritas adalah pertanian.
8. Pemerintah perlu melakukan terobosan mendorong regenerasi petani. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan juga dukungan perlu diberikan kepada generasi milenial agar mereka mau terjun ke usaha tani dan pertanian pangan.
9. Pemerintah mendukung dan mempercepat produksi alat sistem pertanian dari dalam negeri dengan bahan baku lokal.
10. Dalam jangka menengah dan panjang program *food estate* perlu dikembangkan tak hanya mewujudkan swasembada dan kecukupan pangan, tapi juga untuk orientasi ekspor pangan. Program *food estate* dijalankan dengan syarat belajar dari kegagalan-kegagalan program sejenis sebelumnya.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, 2003

Badan Pusat Statistik, 2002

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, 2018

Elizabeth, R. (2021). Akselerasi Inovasi Teknologi Spesifik Lokasi Strategi Peningkatan Produksi Di Masa Pandemi Covid-19. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 532. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4717>

Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2019). Analisis Perkembangan Produksi Beras Dan Impor Beras Di Indonesia. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 219–226. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3613>

### How to Cite

“KEBIJAKAN DAN INOVASI MENINGKATKAN PRODUKSI BERAS”, *JP Nasional*, vol. 1, no. 1, Aug. 2024, Accessed: Aug. 16, 2024. [Online]. Available: <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/5>

### License

Copyright (c) 2024 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).